



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANAK AGUNG MADE SUDANA, S.H., S.I.K., M.H.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI PAPUA BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
PAPUA BARAT**

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

**ANAK AGUNG MADE SUDANA,
S.H., S.I.K., M.H.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	1 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.60 Indeks
8	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.66 Indeks
14	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	76 Indeks

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.183.000.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.116.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.264.024.000 |
| 4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.15.090.000 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Rp.272.577.000 |
| 6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba | Rp.36.442.000 |
| 7. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi | Rp.75.000.000 |
| 8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Rp.525.912.000 |
| 9. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Rp.120.276.000 |
| 10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp.1.390.482.000 |
| 11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.31.750.000 |
| 12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.5.031.000 |
| 13. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.2.534.698.000 |
| 14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp.20.000.000 |

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
PAPUA BARAT**


MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.


**ANAK AGUNG MADE SUDANA,
S.H., S.I.K., M.H.**